

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa pertimbangan yang mendorong penulis tertarik untuk memilih judul sripsi “KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH JERMAN (Studi Kasus: Kabupaten Klaten Sebagai Salah Satu Daerah Penerima Bantuan Teknis Jerman)”, yaitu:

Pertama, adanya kerjasama antara pemerintah Jerman dengan Pemerintah Indonesia yang melibatkan Kabupaten Klaten sebagai objek pelaksanaan kerjasama antara kedua negara tersebut.

Kedua, melihat kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang labil dan membutuhkan banyak perbaikan. Terutama perbaikan perekonomian di daerah, sebagai salah satu faktor utama tercapainya perekonomian nasional yang stabil. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi masalah tersebut.

Ketiga, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tentunya membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya agar dapat membangun negara Indonesia agar lebih maju.

Keempat, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bentuk kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman

Kelima, penulis ingin mengetahui keuntungan yang akan diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Jerman dengan adanya kerjasama ini.

B. Tujuan Penulisan:

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Daerah Klaten dengan Pemerintah Jerman dan mengetahui keuntungan yang diperoleh dari kerjasama tersebut bagi kedua belah pihak.

C. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia tahun 1998 telah mengakibatkan kemunduran di berbagai sektor, terutama bidang ekonomi. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan keadaan ini.

Krisis ekonomi di Indonesia ditandai dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi, bahkan sempat mencapai angka negatif 15-20 %, terjadi inflasi yaitu mencapai 60-90 % pada tahun 1998, jumlah keluarga miskin juga meningkat dari 9 % menjadi 30 % karena biaya hidup naik antara tiga sampai empat kali lipat, selain itu tingginya angka pengangguran, yang menurut beberapa penelitian, setiap penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 % akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar 400.000 orang.¹

¹ Anasita Abimanyu, *Ekonomi Indonesia Baru*, Jakarta 2000, Hal 0

Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi mengakibatkan masalah masalah sosial-ekonomi yang mendasar yang belum terpecahkan. Sampai dengan tahun 2003 tingkat investasi baru mencapai 69,2 % dibanding tahun 1997. perdagangan dalam negeri terhambat diakibatkan antara lain karena adanya pelaksanaan otonomi daerah yang sangat menghambat kelancaran arus barang dan jasa antar daerah. Akibat lain yang ditimbulkan dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi adalah jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,5 juta jiwa dan setiap tahunnya sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru menambah jumlah angkatan kerja dan masalah pengangguran ini menjadi salah satu masalah besar yang banyak dihadapi oleh banyak negara berkembang lainnya.

Adanya krisis ekonomi dan politik tersebut menyebabkan hilangnya kepercayaan investor asing akan kondisi perekonomian dan masalah keamanan Indonesia. Sehingga kegiatan investasi mengalami penurunan. Statistik resmi mengungkapkan dalam kuartal pertama tahun 1998, jumlah investasi mengalami penurunan sampai 22 %. Nilai investasi baru hanya mencapai US\$ 45,1 miliar.²

Kegagalan pemerintah dalam menangani masalah krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia tahun 1998 telah menghilangkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah.

Tidak mengherankan jika krisis ini mendorong para mahasiswa, akademisi, aktivis social, dan komponen komponen masyarakat lainnya untuk mengkritik distribusi kekayaan ekonomi politik administratif dan pemerintahan yang

selama ini dilakukan oleh pemerintah. Konsentrasi kekuatan politik, ekonomi, dan administratif yang selama ini terpusat pada kelompok-kelompok dan lembaga tertentu tidak lagi dapat dipertahankan. Redistribusi kekuasaan secara wajar dan proporsional antar negara, mekanisme pasar, masyarakat sipil, dan antar kelompok diperlukan untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis. Untuk itu reformasi dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, dan pemerintahan diperlukan.³

Proses demokratisasi yang paling menjadi isu utama adalah reformasi tata pemerintahan. Reformasi tata pemerintahan ini diharapkan menjadi satu peluang untuk mempercepat proses demokratisasi di Indonesia. Reformasi tata pemerintahan yang radikal dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan otonomi daerah sejak Januari 2001.⁴

Pelaksanaan otonomi daerah secara radikal telah mengubah hubungan hierarkis yang selama ini terjadi antara berbagai tingkat pemerintah. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan ada beberapa pasal yang mengatur dan memungkinkan pemerintah daerah melaksanakan hubungan luar negeri atau hubungan internasional dengan negara lain.

³ Agus Dwiyanto, dkk, "Reformasi: Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah", Pusat Studi

Dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 88 ayat (1) "*Daerah dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/ badan luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7*". Serta penjelasan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bagian umum, mengenai Dasar Pemikiran (h) menyatakan: "*...kewenangan otonomi daerah luas adalah, keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta bidang lainnya akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah...*".⁵

Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, khususnya yang termuat pada pasal 1.⁶ Pemerintah kabupaten kota sekarang memiliki kewenangan besar untuk merumuskan kebijakan dan programnya sesuai dengan aspirasi mereka masing masing, diluar bidang pertahanan dan keamanan, moneter, agama, kehakiman, dan hubungan luar negeri.⁷ Pemberian wewenang yang luar biasa besarnya kepada pemerintah kabupaten dan kota diharapkan membawa dampak yang positif bagi keneajuan pembangunan daerah, termasuk dalam mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang lebih baik di kabupaten kota.

⁵ *Ibid*, Hal. 9.

⁶ *Sidiq Jambora*, "Otonomi Daerah dan Hubungan Luar Negeri", hal. 100.

Dengan adanya otonomi daerah ini telah memberikan jalan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menindak-lanjuti hubungan diplomatic yang telah dijalin dengan pihak luar negeri: dengan kegiatan kerjasama keuangan, kebudayaan, perekonomian, dan lain lain. Tentu saja dengan catatan, pemerintah daerah hanya boleh melakukan hubungan kerjasama dengan negara yang secara resmi telah melakukan hubungan diplomatic dengan pemerintah pusat Indonesia.⁸

Reformasi tata pemerintahan yang radikal melalui percepatan desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung cepat dan kurang adanya persiapan yang matang, juga mengalami beberapa kendala, antara lain:

1. Masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan professional.
2. Masih terbatasnya sumber sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dari luar daerah.
3. Belum tersusunnya kelembagaan yang efektif.
4. Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas.
5. kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Pembangunan perekonomian perlu didasarkan pada keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah tentunya pada kegiatan perdagangan internasional.

kerajinan rakyat. Selain itu perlu suatu upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah secara efektif dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah. Untuk tercapainya hal itu, prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah pengorganisasian negara yang efisien. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi local juga menghendaki suatu tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good corporate government*) baik di pusat maupun di daerah yang mampu menjalankan suatu kebijakan ekonomi secara efektif.

Sasaran pembangunan perekonomian adalah pertumbuhan melalui pemerataan pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan. Sejalan dengan otonomi daerah, pembangunan ekonomi dengan sasaran tersebut harus berbasis pada kekuatan lokal baik dalam artian sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Pada dasarnya Usaha Kecil Menengah (UKM) memberikan sumbangan yang besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2001, sekitar 99 % usaha di Indonesia tergolong UKM yang sedikitnya menyerap 80 % dari jumlah tenaga kerja yang ada. Dengan demikian sektor UKM memegang peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan terbukti mampu bertahan pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Akan tetapi, kontribusi yang diberikan oleh UKM secara nyata terhadap Produk Domestik Bruto hanya 55 %. Hal ini dikarenakan produktivitas tenaga kerja yang rendah, biaya transaksi yang tinggi, iklim usaha yang tidak kondusif dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Saat ini Indonesia berada dalam masa transisi dari system perekonomian yang sentralistik ke arah otonomi daerah. Pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi saat ini menghadapi tantangan baru untuk menggerakkan perekonomian mereka. Sementara itu, sektor swasta di daerah perlu diberi keleluasaan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan sosial.

Ketidaksiapan Pemerintah Daerah untuk menghadapi era otonomi daerah ini membuat Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersama dengan Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) / Lembaga Kerjasama Teknis Jerman yang mewakili Pemerintah Jerman berusaha untuk memecahkan masalah tersebut dengan melakukan kerjasama dengan beberapa daerah di Indonesia, misalnya saja Pemerintah Jerman melakukan kerjasama dengan beberapa daerah di Jawa Tengah yang meliputi: Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Klaten.⁹

Kabupaten Klaten sebagai salah satu daerah yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Jerman tersebut mengalami penurunan pertumbuhan perekonomian akibat krisis ekonomi tahun 1998. Tahun 1998 saat terjadi krisis ekonomi secara makro melanda bangsa Indonesia pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten mengalami penurunan hingga minus sebelas persen(-11%). Tetapi pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi kabupaten Klaten, menurut Produk

⁹ <http://www.red.or.id/docs/1-nro-profile.htm>. Data diambil pada tanggal 5 September 2005

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 1993 mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,98 %. Mulai tahun 1999 sudah mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.¹⁰ Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Agregat Tahun 1993 – 2000 Kabupaten Klaten

TAHUN	BERLAKU		KONSTAN	
	Nilai (Juta) Rp.	Pertumbuhan %	Nilai (Juta) Rp.	Pertumbuhan %
1993	1.033.236,12		1.033.236,12	
1994	1.189.695,26	15,14	1.096.276,16	6,30
1995	1.320.531,85	11,00	1.177.447,97	7,40
1996	1.472.730,12	11,53	1.261.298,48	7,12
1997	1.700.153,70	15,44	1.295.075,63	2,68
1998	2.401.526,71	41,25	1.148.045,58	-1135
1999	2.698.234,73	12,35	1.153.627,74	0,49
2000	2.948.815,42	9,29	1.199.551,88	3,98

Sumber: PDRB Kabupaten Klaten 2000

Sesungguhnya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Klaten cukup baik, tetapi dalam kaitan pembangunan antar daerah tampaknya masih terdapat kendala yang timbul sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Klaten dan pada akhirnya akan terbentuk sektor unggulan daerah.¹¹

Melihat masalah yang sedang dihadapi Kabupaten Klaten dan daerah-daerah lain di Jawa Tengah, tidak salah apabila BAPPENAS beserta Pemerintah Jerman

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Klaten, "Laporan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Daerah", 2001, Hal. 50.

¹¹ *Ibid*, Hal. 4.

memilih Jawa Tengah termasuk Kabupaten Klaten untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Jerman. Kerjasama antara Pemerintah Daerah Klaten dengan Pemerintah Jerman ini semakin diperkuat dengan adanya wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan adanya otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini membuat kerjasama antara Pemerintah Jerman dengan Pemerintah Daerah Klaten terjalin lebih intens dan manfaat dari kerjasama ini diharapkan akan lebih bisa dirasakan oleh kedua belah pihak.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan Pemerintah Jerman?
2. Apa keuntungan dari kerjasama tersebut bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Jerman?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Dalam berhubungan dengan negara lain, sebuah negara mempunyai politik luar negeri yang meliputi semua kebijakan yang diambil oleh suatu negara yang

mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara pemerintah suatu negara dengan negara lain.¹²

Dalam melihat masalah di atas, setidaknya ada beberapa pemikiran, baik teori maupun konsep yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pokok masalah yang muncul.

Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Berteori adalah mendiskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu dimasa depan.¹³

Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek atau fenomena.¹⁴

1. Konsep Kerjasama

Untuk membahas permasalahan diatas dapat digunakan konsep kerjasama. KJ. Holsti menyatakan bahwa sebagai transaksi dan interaksi diantara negara negara dalam sistem internasional saat ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Timbul berbagai masalah nasional, regional, atau global yang memerlukan perhatian dari banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti

¹² TB Millar, "On Writing About Foreign Policy", dalam James and Rosseau (ed), *International Politics and Foreign Policy*, The Free Press, New York, 1969, Hal.57.

¹³ Mohan Mahand, "Hubungan Internasional: Dinamika dan Modelnya" 1978, Jakarta, 1990

teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kolaborasi atau kerjasama.¹⁵

Istilah kerjasama (*collaboration*), dapat menimbulkan satu citra akan organisasi internasional yang bekerja keras menyelesaikan masalah masalah biasa, atau ahli ahli teknis dalam lapangan yang membantu pihak lain meningkatkan produktivitas pertaniannya.¹⁶

Kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Daerah Klaten dan Pemerintah Jerman adalah kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi ini tertuang dalam beberapa kegiatan ekonomi, misalnya: kegiatan ekspor-impor, investasi, dan bantuan ekonomi.

Bantuan luar negeri berupa penerimaan uang, barang, atau nasihat teknis dari sebuah negara donor kepada penerima merupakan kebijakan yang telah lama digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad.¹⁷ Bantuan itu sendiri terdiri dari empat tipe utama program bantuan¹⁸, yaitu:

- 1) Bantuan militer,
- 2) Bantuan teknis,
- 3) Bantuan hibah (penerimaan),
- 4) Pinjaman pembangunan.

¹⁵ K.J. Holsti, "Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis", Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 1983, Hal. 209.

¹⁶ Loc.Cit.

¹⁷ K. J. Holsti, "Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis" Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 1983, Hal.

Program bantuan yang diberikan Pemerintah Jerman kepada Kabupaten Klaten adalah berupa bantuan teknis. Bantuan teknis dirancang untuk lebih menyebarkan pengetahuan dan keahlian, bukan pangan ataupun uang. Personel dengan keahlian khusus dari negara industri pergi ke luar negeri untuk memberikan nasihat mengenai aneka proyek. Dampak program ini dapat sangat besar, khususnya di daerah pedesaan, sementara biayanya relatif rendah kecuali jika program ini dihubungkan dengan proyek pembangunan besar.¹⁹

2. Teori Aktor Rasional

Graham T Allison,²⁰ mengajukan 3 model teori untuk menjelaskan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Salah satunya adalah model aktor rasional. Dalam model aktor rasional ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan tindakan aktor rasional yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual, perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang ternalar dan terkoordinasi. Dengan penalaran yang sungguh sungguh, dan berusaha menetapkan pilihan atas alternatif alternatif yang ada. Alternatif alternatif haluan kebijaksanaan

¹⁹ *Ibid*, Hal. 247.

²⁰ Graham T Allison, *Essence Of Decision* (Little, Brow, 1971) "Conceptual Model's And The Cuban Missile Crisis". *American Political Science Review* (Sept. 1969), dan Allison and Morton Halperin,

yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung-rugi atas masing masing alternatif.

Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif alternatif ini menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasionalitas yang dikandungnya. Dalam model ini para pemnuat keputusan itu dianggap rasional dan kita umumnya cenderung berfikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional.²¹

Dilihat dari teori aktor rasional diatas, kita bisa menganalisis keuntungan dari kerjasama antar Pemerintah Daerah Klaten dengan Pemerintah Jerman. Keuntungan bagi Jerman itu sendiri sudah diperhitungkan secara rasional oleh Pemerintah Jerman, misalnya: Jerman ingin membuka pasar baru bagi produk barang dan jasa yang mereka produksi, Jerman ingin lebih mempererat kerjasama bilateral dengan Indonesia.

Keuntungan kerjasama tersebut juga sudah diperhitungkan secara rasional oleh Pemerintah Daerah Klaten, misalnya: terciptanya percepatan perekonomian daerah, terciptannya sumber daya manusia yang handal dan kompeten.

3. Konsep Kepentingan Nasional

Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam memutuskan politik luar negeri adalah kepentingan

nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsure yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara. Unsure tersebut mencakup keberlangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Karena tidak ada "interest" secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan suatu pemerintah, maka konsepsi ini dapat lebih akurat jika dianggap sebagai "national interest". Manakala sebuah negara mendasarkan politik luar negeri sepenuhnya pada kepentingan nasional secara kukuh dengan sedikit atau tidak hirau sama sekali terhadap prinsip prinsip moral universal, maka negara tersebut dapat diungkapkan sebagai kebijaksanaan realis, berlawanan dengan kebijaksanaan idealis yang memperhatikan prinsip moral internasional.²²

F. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, maka diperoleh hipotesa sebagai berikut:

- ❖ Bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah Klaten dengan Pemerintah Jerman adalah kerjasama ekonomi berupa pemberian bantuan teknis program Regional Economic Development (RED) / Pengembangan Ekonomi Wilayah yang tertuang dalam kegiatan utama berupa: penciptaan

²² Jack C. Plano dan Roy Oltan, "Kerjasama Internasional", Duta, A. Dardis, 1990, II-1-2

citra daerah dan pemasaran wilayah, kerjasama antar daerah, penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, dan pemberdayaan sektor swasta.

- ❖ Keuntungan dari kerjasama tersebut bagi Pemerintah Daerah Klaten dan Pemerintah Jerman, misalnya:
 - Bagi Kabupaten Klaten, terciptanya sumber daya manusia yang handal dan kompeten sehingga bisa mempercepat pembangunan daerah.
 - Bagi Jerman, Jerman ingin menciptakan pasar baru bagi barang dan jasa yang mereka produksi.

G. Jangkauan Penulisan

Jangkauan penulisan dalam penelitian ini adalah bantuan teknis Jerman yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia dengan meneliti Kabupaten Klaten sebagai salah satu daerah penerima bantuan tersebut. Jangkauan waktu adalah tahun 2002 sampai sekarang.

H. Jenis Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa cara penulisan

1. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden.²³

Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yang terkait langsung dengan hal hal yang sedang diteliti, misalnya: wawancara dengan pihak GTZ-RED Klaten, dan pihak pihak lain yang terlibat dengan pelaksanaan program bantuan Jerman di Klaten.

2. Penelitian Diskriptif

Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap suatu fenomena sosial tertentu, misalnya: perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain lain.²⁴

Dalam penulisan ini penelitian dilaksanakan di Kabupaten Klaten sebagai salah satu daerah penerima bantuan teknis Jerman. Penelitian diskriptif ini dilakukan untuk menjelaskan bentuk kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Daerah Klaten dengan Pemerintah Jerman dan mengetahui keuntungan dari kerjasama tersebut bagi kedua belah pihak.

3. Studi Pustaka

Data melalui studi pustaka diperoleh dari:

- Buku buku yang menunjang;
- Literatur literature;

²³ ...

- Media massa;
- Web Site;
- Laporan laporan.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini direncanakan terdiri dari lima bab, yang terdiri dari:

BAB I, adalah bab pendahuluan. Bab ini memaparkan: alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesis, jangkauan penulisan, jenis penulisan, sistematika penulisan.

BAB II, adalah bab yang memaparkan hubungan bilateral Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman. Pembahasan diawali dengan memaparkan profil Indonesia, Profil Jerman dan Profil GTZ, selanjutnya memaparkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jerman yang terdiri dari kegiatan ekspor, impor, investasi, dan pemberian bantuan antara Indonesia dengan Jerman, memaparkan kerjasama politik yang terdiri dari kegiatan kunjungan pejabat tinggi Indonesia dan Jerman, memaparkan kerjasama kebudayaan antara Indonesia dengan Jerman yang terdiri dari kegiatan pertukaran pelajar dan kunjungan misi kebudayaan.

BAB III, adalah bab yang memaparkan kerjasama antara Pemerintah Daerah Klaten dengan Pemerintah Jerman. Pembahasan diawali dengan memaparkan profil Kabupaten Klaten, yang terdiri dari letak geografis, kondisi sosial kependudukan, struktur perekonomian Kabupaten Klaten, kerjasama luar negeri yang pernah dijalani oleh Kabupaten Klaten. dilanjutkan dengan memaparkan

kerjasama ekonomi, yang terdiri dari kegiatan ekspor Klaten ke Jerman dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Jerman ke Kabupaten Klaten berupa program pengembangan ekonomi wilayah (RED), yang terdiri dari kegiatan utama adalah: menciptakan citra daerah dan pemasaran wilayah, kerjasama antar daerah, penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, pemberdayaan sector swasta.

BAB IV, bab ini memaparkan keuntungan kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Daerah Klaten dengan Pemerintah Jerman. Pembahasan diawali dengan menganalisis keuntungan kerjasama tersebut bagi Kabupaten Klaten sebagai daerah penerima bantuan dan dilanjutkan dengan menganalisis keuntungan kerjasama tersebut bagi Pemerintah Jerman sebagai negara pemberi bantuan.

BAB V, bab ini akan memaparkan kesimpulan dari keseluruhan penulisan dari